

- Dewi Herawati*
Rusdi
Effie Efrida M
- 1** MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMP UNTUK MENGATASI RENDAHNYA KOMPETENSI DASAR SISWA SMP KOTA BENGKULU
- Isabella Hasiana*
- 21** MENGEMBANGKAN KARAKTER ANAK USIA DINI MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL
- Hari Karyono*
Wiwln Andriani
- 29** PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER DI TAMAN KANAK-KANAK
- Fajar Susanto*
- 37** HOW SECOND LANGUAGE ACQUIRED AT SCHOOL: SOME FACTORS INFLUENCING L2 ACQUISITION PENAMBAHAN SAYURAN (BAYAM DAN WORTEL)
- Wahyu Susiloningsih*
- 45** PENGEMBANGAN BUKU AJAR IPS SD KELAS V YANG BERORIENTASI PADA PENDEKATAN CTL (Contextual Teaching and Learning) GUNA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SDN KANDANGAN III SURABAYA
- Ira Eko Retnosari*
- 53** PENGGUNAAN EJAAN PADA JURNAL BUANA PENDIDIKAN, FKIP, UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
- Erna PujiAstutik*
- 63** QUESTIONNAIRE ON TEACHER INTERACTION (QTI) IN ASSESSING CLASSROOM LEARNING ENVIRONMENT: A LITERATURE REVIEW
- Irnawati*
- 73** MAJELIS TA'LIM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI EFEKTIF PILKADA YANG ADIL DAN JUJUR
- HanimFaizah*
- 81** STRATEGI MENTAL COMPUTATION SISWA DALAM ELAKUKAN OPERASI HITUNG PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN BILANGAN ASLI
- Suhartono*
- 91** PENGEMBANGAN MEDIA POSTER DIGITAL TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPS MATERI KONEKTIVITAS ANTAR - RUANG DAN WAKTU PADA SISWA KELAS VII SMP YOS SUDARSO SIDOARJO.



JURNAL BUANA PENDIDIKAN

Jurnal ini terbit dua kali setahun bulan April dan Oktober berisi tulisan ilmiah tentang pendidikan, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Tulisan yang dimuat dapat berupa analisis, kajian pustaka, atau hasil penelitian.

Ketua

Drs. A. Qomaru Zaman, M.Pd.

Wakil Ketua

Drs. Sunyoto Hadi Prayitno, S.T., M.Pd.

Penyunting Ahli

Prof. Dr. I Nyoman Sudana Degeng, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)

Prof. Dr. Iskandar Wirjokusumo, M.Sc. (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Prof. Dr. Wahyu Widada, M.Pd. (Universitas Bengkulu)

Prof. Dr. Kisyani Leksono, M.Hum. (Universitas Negeri Surabaya)

Prof. Dr. Henricus Supriyanto, M.Hum. (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Prof. Dr. Hartanto Sunardi, S.T., S.Si., M.Pd. (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Prof. Dr. Ahman, M.Pd. (Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)

Penyunting Pelaksana

Dra. Dwi Retnani S., M.Si.

Dr. Endang Mastuti Rahayu, M.Pd.

Dr. Sunu Catur Budiono, M.Hum.

Dr. Agung Pramujiono, M.Pd.

Dyah Rochmawati, S.Pd., M.Pd.

Dr. Ismoerdiyahwati, M.Sn.

Staf Pelaksana

Eko Sugandi, S.Pd.

Umi Budi Rahayu, S.E.

Alamat Redaksi

FKIP, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Jalan Ngagel Dadi III-B/37 Surabaya-60245

Email:

buana pendidikan@gmail.com

fkip_adibuana@yahoo.com

Telp/Fax: (031) 5053127

Jurnal Buana Pendidikan diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

JURNAL BUANA PENDIDIKAN

Jurnal ini terbit dua kali setahun bulan April dan Oktober berisi tulisan ilmiah tentang pendidikan, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Tulisan yang dimuat dapat berupa analisis, kajian pustaka, atau hasil penelitian.

Ketua

Drs. A. Qomaru Zaman, M.Pd.

Wakil Ketua

Drs. Sunyoto Hadi Prayitno, S.T., M.Pd.

Penyunting Ahli

Prof. Dr. I Nyoman Sudana Degeng, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)

Prof. Dr. Iskandar Wirjokusumo, M.Sc. (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Prof. Dr. Wahyu Widada, M.Pd. (Universitas Bengkulu)

Prof. Dr. Kisyani Leksono, M.Hum. (Universitas Negeri Surabaya)

Prof. Dr. Henricus Supriyanto, M.Hum. (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Prof. Dr. Hartanto Sunardi, S.T., S.Si., M.Pd. (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Prof. Dr. Ahman, M.Pd. (Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)

Penyunting Pelaksana

Dra. Dwi Retnani S., M.Si.

Dr. Endang Mastuti Rahayu, M.Pd.

Dr. Sunu Catur Budiono, M.Hum.

Dr. Agung Pramujiono, M.Pd.

Dyah Rochmawati, S.Pd., M.Pd.

Dr. Ismoerdiyahwati, M.Sn.

Staf Pelaksana

Eko Sugandi, S.Pd.

Umi Budi Rahayu, S.E.

Alamat Redaksi

FKIP, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Jalan Ngagel Dadi III-B/37 Surabaya-60245

Email:

buana pendidikan@gmail.com

fkp_adibuana@yahoo.com

Telp/Fax: (031) 5053127

Jurnal Buana Pendidikan diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

DAFTAR ISI

1	<i>Dewi Herawati; Rusdi; Effie Efrida Muchlis, Model Pembelajaran Matematika SMP Untuk Mengatasi Rendahnya Kompetensi Dasar Siswa SMP Kota Bengkulu</i>	1
2	<i>Isabella Hasiana, Mengembangkan Karakter Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisional</i>	21
3	<i>Hari Karyono, Wiwin Andriani, Penanaman Pendidikan Karakter di Taman Kanak-Kanak</i>	27
4	<i>Fajar Susanto, How Second Language Acquired at School: Some Factors Influencing L2 Acquisition</i>	35
5	<i>Wahyu Susiloningsih, Pengembangan Buku Ajar IPS SD Kelas V Yang Berorientasi pada Pendekatan CTL (Contextual Teaching And Learning) Guna Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SDN Kandangan III Surabaya</i>	43
6.	<i>Ira Eko Retnosari, Penggunaan Ejaan pada Jurnal Buana Pendidikan, FKIP, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya</i>	51
7.	<i>Erna PujiAstutik, Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) in Assessing Classroom Learning Environment: A Literature Review</i>	61
8.	<i>Irnawati, Majelis Ta'lim Sebagai Media Sosialisasi Efektif Pilkada yang Adil dan Jujur</i>	71
9.	<i>Hanim Faizah, Strategi Mental Computation Siswa dalam Melakukan Operasi Hitung Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan asli</i>	79
10.	<i>Suhartono, Pengembangan Media Poster Digital Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Materi Konektivitas Antar - Ruang dan Waktu pada Siswa Kelas VII SMP Yos Sudarso Sidoarjo</i>	89

MAJELIS TA'LIM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI EFEKTIF PILKADA YANG ADIL DAN JUJUR

Irnawati

Dosen Prodi PPKn – FKIP - Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
md.irnaa@gmail.com

Abstract

The implementation of local elections was intended as one of the real implementation of the process of democratization. Islamic study groups can be an alternative media in an attempt to make the local elections fair and honest to improve the quality of democracy. Islamic study groups has many functions, are : function transformation of scientific, silaturrahi media, dissemination of government programs, the control function of the community and others. While the urgency of Islamic study groups as a medium of socialization of local elections is based on the proposition that, most of Indonesian voters are muslim, voter characteristics that are paternalistic, and islamic study groups as a media to construct an effective voter behavior. Besides it, islamic study groups also has a strategic media to be fair and honest socialization. The strategy namely, slipped local elections materials among people, build effective community with simple materials, utilizing information technology, selecting public islamic groups and Friday sermons as a form of islamic study groups. Expected of function Islamic study groups as a socialization media of local elections, it will created the voters behavior who have integrity and honesty so that the dream of improving the quality of democracy can be realized.

Keywords: *local election, islamic study group, socialization media, democracy.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*) secara formal telah memenuhi syarat sebagai negara demokrasi yaitu salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan daerah secara langsung. Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587). Maka diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pilkada dimaksudkan sebagai salah satu implementasi nyata dari proses demokratisasi. Meskipun realitas yang terjadi, pilkada di beberapa daerah menyisakan konflik. Sehingga usaha menjadikan pilkada sebagai media untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi terhambat. Sebenarnya melalui mekanisme pilkada langsung oleh masyarakat, diharapkan dan diasumsikan, akan terjadi negosiasi kepentingan serta terbangun ikatan kuat antara calon pemimpin dan yang

memilihnya. Jika kontraktual terselenggara dengan baik dalam proses pilkada, maka para pemimpin terpilih dipastikan akan menjalankan tanggungjawabnya kepada masyarakat

Demokratisasi masih bergerak pada lintasan formal-prosedural. Karena proses beberapa tahun terakhir ini membuktikan bahwa cita ideal meleset. Desentralisasi dan otonomi, serta demokratisasi hanya bergerak secara prosedural saja. Najib (2006) menyatakan, Skema kebijakan politik daerah kurang berlangsung baik dan melahirkan karakter oligarki yang secara kental ditandai lahirnya aktor-aktor politik lokal berwatak dan bergaya *bosses*, di mana mereka itulah pelaku pembajakan dan membonceng arus perubahan di daerah.

Supremasi demokrasi tidak serta merta hanya bertumpu kepada pilar-pilar demokrasi *an sich*, semisal adanya Negara hukum, penghormatan terhadap minoritas, kesamaan di depan hukum, pemilihan pemimpin langsung oleh rakyat dan pilar demokrasi lainnya. Akan tetapi demokrasi

juga membutuhkan perilaku manusia dalam mewujudkannya.

Perilaku manusia dapat dibentuk melalui berbagai hal, termasuk melalui Majelis Ta'lim. Sehingga majelis ta'lim menjadi media alternatif sebagai upaya menjadikan pilkada untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Perilaku manusia menempati posisi strategis dalam proses demokratisasi. **Pertama**, Manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa dan diberi sifat serba ingin tahu (*man is curious animal*). Dengan bakat pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi lingkungan dirinya (Peursen, 1983). Dengan demikian, untuk menalar manusia kemudian dapat mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan-Nya, meskipun dalam aktivitas gerakannya terus menerus dihadapkan pada pilihan yang baik dan buruk, benar dan salah, indah dan buruknya, yang semuanya pada dasarnya merupakan hukum keseimbangan yang kodrati berlaku dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, berhasil atau tidak demokratisasi bergantung kepada sejauh mana pemahaman dan pengertian manusia tentang substansi dan orientasi demokrasi.

Kedua, Manusia merupakan makhluk yang berfikir (*anima intellectiva*), yang terlengkapi dengan berasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang didapatkannya lewat kegiatan budi sebagai jalan mencapai pengetahuan dari pengetahuan yang satu kepada pengetahuan yang lain dengan perantara pengetahuan yang lain dengan perantara pengetahuan penghubung (Gazhalba, 1981).

Ketiga, Perilaku manusia pada dasarnya adalah kepribadian jiwa yang seimbang sehingga membentuk dan mampu merealisasikan eksistensi yang sebenarnya, yaitu didalam kehidupan. Kepribadian jiwa yang seimbang, yakni manusia salah satunya dapat menggunakan persepsinya sendiri tentang kenegaraan dan politik, namun tetap berlandaskan perilaku kepribadian manusia yang religious serta dilandasi dengan keimanan keyakinan beragama.

Dengan demikian, mengkonstruksi perilaku pemilih menjadi pilihan yang tepat. Membentuk pemilih yang jujur dan adil bukan persoalan mudah, melainkan berhubungan erat dengan moral dan ketakwaan manusia. Salah satu sarana mengkonstruksi perilaku pemilih ini melalui media adalah Majelis Ta'lim. Melalui Majelis Ta'lim yang sarat dengan saran-saran dan petuah tentang keagamaan maupun kenegaraan perilaku dapat dipengaruhi untuk memahami pilkada sebagai salah satu proses peningkatan kualitas demokrasi.

Berangkat dari hal tersebut, penulis berasumsi bahwa dibutuhkan sebuah konsep yang nyata bagaimana menjadikan Majelis Ta'lim sebagai media efektif dalam mensosialisasikan Pilkada yang jujur dan adil. Oleh karenanya, penulis akan mencoba membahasnya secara holistik dan komprehensif yakni: 1) untuk mengetahui Urgensi Majelis Ta'lim sebagai Media Sosialisasi Pilkada yang Adil dan Jujur; 2) untuk mengetahui Strategi Majelis Ta'lim sebagai Media Sosialisasi Pilkada yang Adil dan Jujur.

Kerangka Berfikir Konstruksi Perilaku Manusia

Perilaku manusia dibangun dalam lapisan bangunan yang kompleks. Terdapat lapisan fisik, lapisan emosional, dan lapisan spiritual. Hubungan antar lapisan yang terbentuk dalam diri jiwa manusia tidak dapat terpisahkan. Bangunan perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar manusia.

Adapun dari luar, perilaku dipengaruhi antara lain (Suwanto, 2001); **Pertama**, faktor lingkungan. Aristoteles mengatakan terbentuknya masyarakat karena adanya *instink* sosial pada manusia yang merupakan bakat asli. **Kedua**, selain lingkungan, keluarga juga mempengaruhi tingkah laku manusia itu sendiri, misalnya perilaku orang tuanya di anut oleh anaknya, karena sejak dini sudah pasti sangat berhubungan langsung dengan keluarganya. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri manusia sendiri adalah factor keimanan dan moralitas. Ketika manusia ikhlas taat kepada Tuhan, kepribadian akan semakin terbentuk,

dapat terbentuk kepribadian unggulan. Kecintaan kepada Allah SWT yang semakin kuat akan memusnahkan segala kecintaan dan penyembahan kepada selain-Nya (Al Jauziyyah, tt). Dengan begitu, semua makhluk adalah manusia itu sendiri mempunyai makna yang terstruktur yaitu makna Ketuhanan yang menghadirkan segala kerinduan rohani dan kehadiran hati.

Para ahli Psikologi, ketika mengkaji tentang kepribadian, memandang individu sebagai keutuhan yang integral, yang bekerja sebagai satu kesatuan dari seluruh anggota tubuh dan jiwa, yang perilaku dan responnya dibatasi dengan asumsi tentang dirinya yang berbeda dengan orang lain (Lazarous, 1981).

Ahli psikologi yang lain memandang kepribadian sebagai bangunan dan proses psikologis yang permanen, yang mengatur pengalaman individu. Suatu kepribadian mempunyai aturan yang dinamis, yaitu tubuh dan jiwa, yang membatasi tabiatnya secara khusus sesuai dengan lingkungannya. Maka dapat dimengerti bahwa konstruksi terhadap perilaku manusia sangatlah penting untuk diperhatikan. Lebih-lebih menyangkut hubungan pemilih dengan yang dipilih dalam Pilkada.

Urgensi Perilaku Manusia dalam Proses Demokrasi

Perilaku manusia merupakan aspek sarana dalam melaksanakan proses demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kumpulan aturan formal melainkan juga aturan moral yang didasarkan pada suatu sistem nilai kebenaran dan keadilan. Pentingnya perilaku manusia dalam demokrasi merupakan konsep penting dalam Islam, karena perilaku yang jujur, adil merupakan dasar dalam proses demokrasi (Sodiq, wawancara, 2008).

Perilaku manusia yang dibangun berdasarkan persaudaraan orang-orang yang beriman akan berimplikasi kepada sifat baik dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Sedangkan dalam konteks Negara akan menghasilkan Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan, dan permusyawaratan perwakilan, oleh karena itu

Negara yang terbentuk dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan dasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan (UUD NRI 1945).

Paradigma lain terhadap pentingnya perilaku dibangun atas konsep bahwa demokrasi bukan hanya urusan formal belaka, tetapi juga perilaku (*matter of behavior*) (Raharjo, 2006). Demokrasi seharusnya didapat dari perilaku manusia yang bertanggung jawab dan adil. Sebab tidak dipungkiri bahwa menjalankan Negara demokratis bukan hanya soal logika tetapi juga pengalaman perilaku manusia (Raharjo, 2006). Pengalaman seseorang tersebut biasanya terpengaruh dari apa yang ada pada lingkungannya serta pribadi manusia tersebut yang memang secara biologis sudah terbentuk sejak dini. Perilaku manusia adalah latar belakang manusia didalam menjalankan hukum pemerintahan. Gagalnya proses demokrasi lebih banyak diakibatkan oleh faktor perilaku yang menyimpang. Maka perlu adanya perbaikan yang dilandaskan kepada perilaku yang bermoral. Sampai saat ini hamper seluruh komponen baik dari diri pemerintahan maupun masyarakat mengabaikan perilaku dan melewatkan perhatian terhadap kultur konstitusi. Seperti membuat Undang-Undang yang tidak ada gunanya (Raharjo, 2006), dalam arti tidak terpakai setelah disahkan.

Ulasan diatas menyiratkan bahwa kesuksesan demokratisasi bukan hanya dihasilkan dari pilar-pilar demokrasi yang bagus, namun aspek perikulahl yang mendorong untuk suksesnya proses demokratisasi tersebut.

Pembahasan

Tinjauan Umum Majelis Ta'lim

Definisi Majelis Ta'lim

Majelis Ta'lim adalah kegiatan yang bertujuan untuk melatih diri mencari pengetahuan. Majelis Ta'lim dapat dikatakan sama dengan jama'ah yang berkelompok membahas dan mebicarakan berbagai ilmu (Sodiq, wawancara, 2008). Para Jama'ah Pengajian Umum, Khutbah Jum'at adalah salah satu contoh Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim

merupakan sarana pusat pengembangan intelektual yang mudah diakses oleh jama'ah muslim.

Pada masyarakat tertentu, baik di pedesaan maupun perkotaan, dimana tidak ada pesantren, biasanya dibentuk kumpulan-kumpulan pengajian yang dihadiri oleh masyarakat, khususnya yang paling banyak kaum wanita, yakni Ibu-ibu. Kaum yang dianggap sebagai tulang punggung pendidikan keluarga. Dalam perkumpulan Majelis Ta'lim Ibu-ibu maupun Bapak-bapak sambil bersilatullahmi (menjalin tali persaudaraan) mendapat siraman rohani dan pengetahuan agama dengan tema pembicaraan yang sangat bervariasi, sesuai dengan kebutuhan dan *issue* yang berkembang dalam masyarakat. Majelis Ta'lim ini biasanya dipimpin oleh tokoh agama di masyarakat tersebut yang dianggap memiliki wawasan keagamaan dan keilmuan yang memadai, atau kadang-kadang juga mendatangkan seorang pemuka agama seperti Kyai, Ulama' atau Ustadz-Ustadzah dari daerah lain untuk memperkaya ilmu.

Pada waktu tertentu, secara bersama-sama biasanya para jamaah melakukan ziarah (berkunjung) ke tempat para penyebar Agama, contohnya Wali Songo di Jawa, atau mengikuti tabligh Akbar di pesantren tertentu. Hal tersebut dilakukan sebelum munculnya gerakan modernisasi Islam di Indonesia, kelompok Majelis Ta'lim ini sangat bersifat terbuka. Namun setelah terjadi gerakan modernisasi dan munculnya paham keagamaan yang banyak dan bertentangan serta baru, maka Majelis Ta'lim mengalami perkembangan yang khas, bahkan ada yang terkesan eksklusif.

Fungsi Majelis Ta'lim

Majelis Ta'lim, baik secara teoritik maupun praktek memiliki beberapa fungsi yang sangat mendasar. Diantar fungsi mendasar tersebut, yaitu: **Pertama**, sebagai fungsi Penyebaran Ilmu, Majelis Ta'lim memiliki fungsi yang penting sebagai penyebaran ilmu (Sodiq, wawancara, 2008), karena yang menjadi sebab cirri khas adalah menyiarkan ajaran Ketuhanan kepada masyarakat. Majelis Ta'lim adalah majelis ilmu yang dimuliakan Allah

SWT. Sebab barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, setiap langkahnya merupakan tambahan kemuliaan sekaligus keberkahan dan ampunan atas kesalahan manusia.

Kedua, sebagai Media Silatullahmi, Majelis Ta'lim berperan aktif dalam menjaga dan menjalin hubungan baik sesama muslim. Kegiatan-kegiatan Majelis Ta'lim mempertemukan umat Islam dalam satu wadah. Sehingga terjalin proses silatullahmi berlangsung secara berkesinambungan.

Ketiga, sebagai Media Sosialisasi Program Pemerintah, Setelah bangsa Indonesia merdeka, Majelis Ta'lim ini tidak jarang dijadikan sarana media sosialisasi program pemerintah. Pada zaman Orde Baru, sebagai contoh, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) tidak dapat dipisahkan dari peran serta Majelis Ta'lim di dalamnya. Tanpa hal tersebut, dapat dipastikan bahwa program tersebut akan mengalami kegagalan total. Dan di zaman itu pula, tidak jarang Majelis Ta'lim menjadi obyek tekanan politis. Namun sekarang lebih mengarah yang berlandaskan dengan keadilan dan kejujuran (bijak) dalam menyampaikan sosialisasi program tertentu.

Keempat, sebagai fungsi Kontrol terhadap Masyarakat, Alangkah lebih mulia lagi apabila Majelis Ta'lim juga dapat menjadi alat kontrol masyarakat. Majelis Ta'lim dapat dan pasti mampu menjadi penyeru "*amar ma'ruf nahi mungkar*" agar semua masyarakat selalu sadar untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan masyarakat dalam mensosialisasikan hal-hal tertentu, terutama berkaitan dengan pemilihan pemimpin yang bijaksana.

Kelima, sebagai fungsi Mencetak Generasi Ulama', yaitu untuk mencetak generasi Ulama' masa depan serta mencetak para pemuda pemudi untuk menyerukan kebaikan dan *berakhlakul karimah* (berkelakuan baik).

Urgensi Majelis Ta'lim Sebagai Media Sosialisasi Pilkada

Ada beberapa hipotesis tentang urgensi Majelis Ta'lim sebagai media sosialisasi Pilkada antara lain: **Pertama**, pemilih di Indonesia

adalah mayoritas muslim. Sehingga memanfaatkan rasa keagamaan mereka sebagai bagian dari urusan duniawi adalah penting. Seorang muslim harus diberikan pemahaman bahwa partisipasi dalam pilkada merupakan hak warga Negara dan juga merupakan kewajiban. Memilih pemimpin adalah tanggungjawab warga muslim, oleh karenanya, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak memilih dalam pilkada. Melalui Majelis Ta'lim inilah pesan-pesan kewajiban muslim sebagai warga Negara dapat disampaikan. Selain itu, Islam menempatkan pemimpin adalah *fardhu a'in* (kewajiban individual) sifatnya. Hal ini berdasarkan tradisi kenegaraan yang telah dipraktikkan Nabi Muhammad ketika Beliau memimpin Madinah.

Kedua, pemilih di Indonesia adalah pemilih yang bersifat *paternalistik*. Dimana pemilih cenderung mengikuti *patrocleimnya*. Oleh karenanya menganalisa perilaku pemilih di Indonesia sepertinya lebih tepat menggunakan pendekatan *veberian* yang menjelaskan peran dominan aktor dalam sebuah sistem. Aktorlah atau panutan yang menentukan ke arah mana sebuah masyarakat hendak dibawa, bagaimana masyarakat dikelola dengan baik. Panutan atau aktorlah yang bersifat aktif dalam menafsirkan (menterjemahkan) makna sebuah sistem (Burns, ed, 2000).

Aktor dalam konteks sejarah Indonesia klasik adalah para elite Agama seperti *Kyai*. *Kyai* (Pemuka Agama Islam) memiliki posisi khas dan menentukan. Baik dalam kehidupan politik, sosial maupun budaya. Seorang *Kyai* selain sebagai seorang tokoh Agama Islam, ia pun menjadi panutan dan sumber perkembangan kebudayaan lokal. Maka, tidak jarang seorang *Kyai* adalah juga sebagai seorang budayawan atau seniman. Bahkan *Kyai* juga berperan sebagai wakil masyarakatnya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang *berbau* politik ataupun kehidupan sehari-hari.

Bahwasanya hal diatas dapat muncul dalam beberapa pemikiran masyarakat di Indonesia, disebabkan karena: *Pertama*, belum semua pemilih memahami hak dan kewajibannya dalam bernegara. *Kedua*, latar belakang pendidikan dan ekonomi pemilih yang

tidak memberikan akses informasi yang luas tentang hak dan kewajiban warga Negara, tetapi saat ini sudah mulai sedikit masyarakat yang *melek* hukum dan berpolitik. Dalam teori aksi atau tindakan (*action theory*) (Beilharz, 2005) yang dikembangkan Parson disebutkan bahwa: 1) setiap aktor cenderung mengejar tujuan-tujuan tertentu, dimana 2) dalam mengajar tujuan-tujuan itu, setiap aktor memiliki alternatif cara, alat serta teknik tertentu yang dianggap "*suitable*" (Poloma, 1999).

Dari analogi teori diatas, bahwa para *Kyai*, Ustadz-Ustadzah, yang meberikan ceramah dalam Majelis Ta'lim berpotensi untuk diikuti oleh para jama'ah anggota Majelis Ta'limnya. *Ketiga*, hipotesis dilanjutkan adalah Majelis Ta'lim sebagai media menkonstruksi perilaku pemilih yang efektif. Sebab dalam Majelis Ta'lim berkumpul secara jama'ah para pemilih (Sodiq, wawancara, 2008). Dalam acara Majelis Ta'lim, dapat memberikan penjelasan dengan tepat, pengertian terhadap jama'ah yang juga pemilih- arti dan pentingnya pilkada yang dilangsungkan dan dipilih oleh pemilih, yakni warga. Dalam pemaparan dapat menunjukkan bahwa Majelis Ta'lim dapat memberikan kontribusi terhadap pemilu.

Sebab saat ini banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi kebenaran janji pilkada. Dengan demikian Majelis Ta'lim menjadi alternatif solusi untuk ikut serta dalam mensosialisasikan pilkada dengan substansi pernyataan bahwasanya pilkada sangat penting untuk kehidupan kita semua.

Ditambah lagi kepercayaan terhadap partai politik makin menurun sehingga banyak para pemilih enggan untuk memberikan sumbangsih pada pesta rakyat ini. Rakyat menilai partai politik tidak memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan mereka. Sehingga diharapkan Majelis Ta'lim yang selama ini dipandang sebelah mata oleh para penguasa, dapat membuktikan dalam perannya sebagai cara dan media untuk mensosialisasikan pilkada terhadap para jama'ah maupun terhadap masyarakat luas, seperti contoh tahun ini salah satu Calon Bupati Sidoarjo menghadiri Majelis Ta'lim di Kabupaten Sidoarjo untuk

memperkenalkan profil atau mendekatkan diri kepada masyarakat.

Majelis Ta'lim dengan sendirinya merupakan media tepat sebagai bagian dari proses pilkada yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat pilkada dan demokrasi. Selain itu Majelis Ta'lim *bias* mengingatkan jama'ah untuk memberikan hak suara dengan mengedepankan apa yang ada pada kata hati (*consciousness*).

Strategi Majelis Ta'lim Sebagai Media Sosialisasi Pilkada

Sebagai sebuah media, Majelis Ta'lim memiliki strategi-strategi dalam mensosialisasikan pilkada yang jujur dan adil. Strategi ini, penulis dapatkan dari hasil wawancara dari beberapa nara sumber yang berprofesi sebagai da'i atau penceramah. Adapun strategi tersebut antara lain:

1) Menyelipkan Materi Pilkada dan Demokrasi disela-sela Pengajian

Materi dalam Majelis Ta'lim selalu berubah-ubah sesuai dengan konteks moment pada saat Majelis Ta'lim dilaksanakan. Misalnya, Majelis Ta'lim yang rutin setiap minggu, maka temanya adalah membahas hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Atau Majelis Ta'lim yang diadakan dalam rangka Maulid Nabi atau Isra' Mi'raj maka temanya adalah materi yang berhubungan dengan dua tema tersebut.

Sedangkan Majelis Ta'lim yang juga berfungsi sebagai media sosialisasi pilkada, maka da'i atau penceramah dapat menyelipkan materi-materi yang berkaitan dengan pilkada dan demokrasi. Materi-materi tersebut dibahas dalam bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh para jama'ah atau anggota. Para penceramah agama, memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan materi yang dapat mencerahkan pemikiran-pemikiran jama'ah tentang pilkada dan demokrasi. Dengan menyelipkan materi tersebut, dengan sendirinya para jama'ah dapat memahami serta sadar terhadap hak dan kewajibannya

sebagai warga Negara untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya.

2) Membangun Komunikasi Efektif dengan Materi Sederhana

Materi menjadi tema penting dari proses transformasi dalam Majelis Ta'lim. Oleh karenanya, para da'i atau penceramah dituntut untuk bisa menyusun secara baik dan tepat materi-materi yang berhubungan dengan pilkada. Sehingga para jama'ah akan lebih mudah memahami. Contoh strategi transformasi Majelis Ta'lim dalam proses media sosialisasi adalah memberikan pengetahuan mengenai pentingnya proses keikutsertaan warga dan jama'ah akan demokrasi. Peradaban yang semakin berkembang memberikan keleluasaan terhadap ruang gerak para tokoh agama, *mu'alim*, ustadz dan para jajarannya dalam memberikan pengetahuan tentang pemilihan kepala daerah terhadap jalannya pemerintahan.

Dengan strategi tersebut, para penceramah dapat saling berkomunikasi dengan para jama'ah. Sehingga perilaku kehidupan sehari-hari para tokoh tersebut bersentuhan langsung terhadap masyarakat, berbincang tentang peranan masyarakat yang sangat penting, memberikan masukan-masukan untuk memahami bagaimana proses demokrasi yang baik, apa saja yang akan di peroleh jika kita sebagai warga Negara dapat merasakan akibat dari proses turut serta andil dalam kehidupan bernegara ini (Sodiq, 2008). Strategi ini akan berimplikasi kepada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam memahami demokrasi (Kortens, 1990).

3) Memanfaatkan Teknologi Informasi

Era teknologi informasi juga berdampak positif terhadap keberadaan Majelis Ta'lim. Seorang da'i atau penceramah dapat melakukan interaksi diluar Majelis Ta'lim dengan memanfaatkan teknologi semisal telepon *selluer*, *android*, *ipad*, dan media internet.

4) Memilih Pengajian Umum dan Khutbah Jum'at Sebagai Bentuk Majelis Ta'lim

Dengan bentuk Pengajian Umum penyampaian materi lebih menyeluruh dan terbuka. Sebab para jama'ahnya banyak dan berbagai kalangan, adanya proses dialog antara para tokoh agama dengan masyarakat langsung. Dalam hal memberikan jawaban terhadap *audiens* yang hadir atau para penanya materi yang disampaikan, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat akan terjawab dalam proses dialog tersebut.

Sedangkan *Khutbah* Jum'at memberikan kontribusi juga terhadap strategi para penggerak Majelis Ta'lim, seperti tokoh agama. Para jama'ah Jum'at lebih cepat penyampaiannya dikarenakan kepribadian mereka yang taat menjalankan perintah Tuhan untuk melakukan ibadah tersebut. Memberikan wacana kebangsaan, memberikan konsep-konsep tentang kepemimpinan, keadilan, kejujuran dan memberikan penjelasan bahwasanya pentingnya proses pilkada tersebut.

Dalam umat muslim dicontohkan, muslim melihat Nabi Muhammad SAW sebagai figur Nabi dan manusia biasa, figur yang memiliki pandangan politik dan spiritual yang hebat. Dengan adanya ini Majelis Ta'lim adalah strategi tepat terhadap memberikan pengarahan kepada jama'ah atau masyarakat luas (Esposito, 2005)

Strategi Majelis Ta'lim dalam mensosialisasikan pilkada merupakan bentuk turut serta dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah, suatu bentuk jalan baru bagi tempat atau media untuk memberikan pengetahuan, pengarahan, dan pemahaman terhadap masyarakat pada jama'ah Majelis Ta'lim.

Simpulan dan Saran

Majelis Ta'lim sebagai media sosialisasi pilkada merupakan bentuk keikutsertaan jama'ah muslim untuk memberikan kontribusinya terhadap kenegaraan. Didalam Majelis Ta'lim adanya banyak jama'ah memberikan ruang terhadap para tokoh agama untuk mensosialisasikan pilkada secara efektif, terbuka, adil dan jujur kepada masyarakat.

Berfungsi sebagai media, Majelis Ta'lim memberikan penjelasan, informasi, pemahaman terhadap masyarakat, yakni terutama para jama'ah tersebut akan arti pentingnya pilkada dalam kehidupan bernegara.

Majelis Ta'lim juga akan berpengaruh kepada perilaku manusia khususnya perilaku pemilih. Sebab demokrasi tidak hanya bergantung kepada pilar-pilar demokrasi melainkan juga kepada perilaku manusia. Sehingga latar belakang yang mempengaruhi perilaku manusia juga sangat menentukan dalam proses suksesnya pilkada. Dari hal itulah Majelis Ta'lim merupakan tempat untuk mengembangkan kesadaran kita terhadap demokrasi yang didasari dengan spiritualitas yang tinggi.

Bahwasanya penulis ingin memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit terhadap pelaksanaan Pilkada, sehingga kualitas demokrasi yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. **Pertama**, diharapkan dengan wacana karya ilmiah ini mampu memberikan masukan akan pentingnya suatu spiritualitas disisi intelektual, yakni kepribadian sebagai para pemimpin maupun para pemilih yang jujur dan adil sesuai dengan hati nurani masing-masing. **Kedua**, seruan untuk mengembalikan apabila Majelis Ta'lim kembali pada ruh awal kemunculannya, sebagai kelompok terbuka dan tidak eksklusif, tentunya peran sosial politik yang di embannya akan lebih murni, netral dan lebih melihat kepentingan semua pihak. Jika tidak, jangan heran apabila Majelis Ta'lim, secara sadar atau tidak, dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu, demi kepentingan mereka sendiri. Bila demikian, jangan salahkan agama apabila bangsa ini mengalami kehancurannya. Atau jangan pula salahkan orang yang menuduh agama sebagai penyebab matinya bangsa ini.

Daftar Pustaka

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. Tt. *Ighatsah Al-Lahfan min Mashayidi Asy-Syaithan* Juz 2. Beirut: Daar Al-Ma'rifah.

- Beilharz, Peter. 2005. *Teori-teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- C.Kortens, David. 1990. *Getting to the 21st Century*. West Hartford: Kumairan Press.
- Gazhalba, Sidi. 1981. *Sistematika Buku II*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Lazarous, S.Richard. 1981. *Kepribadian*. Beirut: Daar Asy-Syuruq.
- L.Esposito, John. 2005. *Islam Aktual*. Depok: Inisiasi Press.
- Najib, Mohammad. 2006. *Promosi Pilkada Damai dan Demokratis*. www.kompas.com
- Peursen, C.A.Van. 1983. *Orientasi di Alam Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Poloma, Margaret M. 2001. *Sosiologi Kontemporer*. Bandung: Rosda Karya.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- R. Burns, Tom. 2000. *Manusia, Keputusan, Masyarakat: Teori Dinamika antara Aktor dan Sistem untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Rosda Karya.
- Suwanto, Agus. 2001. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wawancara dengan H.M.Sodiq, 2008, di Kantor Fakultas Dakwah Surabaya.

PETUNJUK BAGI PENULIS JURNAL

Sistematika

Artikel yang berupa hasil penelitian disusun dengan sistematika : Judul, Nama Penulis, Abstrak 1. Pendahuluan (berisi latar belakang permasalahan dan tujuan penulisan atau ruang lingkup tulisan), 2. Metode Penelitian 3. Hasil dan Pembahasan, 4. Kesimpulan dan saran, Daftar Pustaka. Sedangkan artikel yang berupa analisis dan kajian teori, disusun dengan sistematika: Judul, Nama Penulis, Abstrak, 1. Pendahuluan (berisi latar belakang permasalahan dan tujuan penulisan), 2. Hasil dan Pembahasan 3. Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka. Penyunting berhak menyempurnakan kalimat, tanpa merubah maksud dari kalimat. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan revisi atas dasar rekomendasi dari penyunting. Panjang artikel diupayakan maksimal 15 halaman A4. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Format

Artikel ditulis dalam bentuk ketikan dua spasi, font 12 Times New Roman dalam kolom tunggal di atas kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan margin kiri 2,5 cm, margin kanan 1,5 cm, margin atas 3 cm dan margin bawah 2,5 cm. Setiap halaman diberi nomor halaman. Khusus Untuk judul (font 12), tempat penelitian/tempat bekerja penulis (Font 12) dan Abstrak (Font 11) ditulis dalam kolom tunggal, termasuk kata kuncinya.

Judul Artikel

Spesifik dan efektif, dan ditulis dalam bahasa Indonesia (maksimum 15 kata) dan bahasa Inggris (maksimum 12 kata). Nama Penulis. Ditulis lengkap (tanpa gelar akademik/sebutan apapun) disertai nama lokasi penelitian atau tempat penulis bekerja di bawah judul artikel serta alamat email.

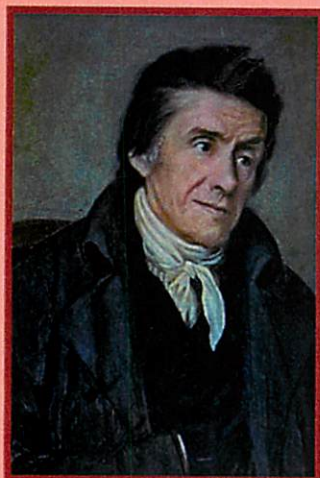
Abstrak

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang masing masing diusahakan sekitar 200 kata, yang secara singkat memberikan gambaran aspek penting dan hasil pokok penelitian serta kesimpulannya. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci yang sesuai (4 kata kunci).

Tabel dan Gambar

Harus diberi nomor secara berurutan sesuai dengan urutan pemunculannya. Setiap gambar dan tabel perlu judul singkat yang diletakkan di atas untuk tabel dan diletakkan di bawah untuk gambar. Pembuatan tabel dan gambar dalam format hitam dan putih tanpa gambar latar belakang (background). Daftar pustaka yang ditulis hanya memuat sumber – sumber yang dirujuk dalam artikel. Daftar pustaka disusun dengan tata cara: Buku: Penulis (tahun). **Judul Buku** (cetak tebal). Penerbit. Jurnal: Penulis (tahun). **Judul Tulisan** (cetak tebal). *Nama Jurnal* (cetak miring). **Volume** (cetak tebal). Nomor. Halaman. Paper dalam prosiding: penulis (tahun). **Judul Tulisan** (cetak tebal). *Nama Seminar* (cetak miring). Tanggal Seminar. Halaman. Tesis/Tugas Akhir: Penulis (Tahun). **Judul Tesis/Tugas Akhir** (cetak tebal). Tesis/Tugas Akhir. Universitas. Dokumen Pemerintah: Organisasi (Tahun). Nama Dokumen (cetak tebal). Tempat. Penulisan pustaka dalam sub bab artikel ditulis dengan nama penulis dan tahun penerbitan di dalam kurung (penulis, Tahun).

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)



Johann Heinrich Pestalozzi lahir dan dibesarkan di Zurich Swiss pada tanggal 12 Januari 1746. Dia berasal dari keluarga Protestan, ayahnya seorang doctor yang meninggal waktu Heinrich berumur enam tahun dan hanya meninggalkan sedikit warisan.

Setiap liburan, Heinrich tinggal dengan kakeknya, seorang pendeta Protestan yang melayani di desa. Hal inilah yang mendorong Heinrich untuk menjadi pendeta namun keinginan ini buyar setelah dia lupa akan isi khotbahnya pada saat membawakan khotbah di depan ujian klasis. Sebelumnya dia juga pernah berbuat kesalahan dalam menuntun para hadirin mengucapkan “doa Bapa kami”. Heinrich kemudian beralih ke bidang hukum agar dapat masuk ke dalam pemerintahan dan menyusun undang-undang yang memihak kaum lemah. Namun hal ini kembali menemui kegagalan karena keterlibatannya dalam kelompok politis yang dianggap radikal oleh pemerintah. Pestalozzi kemudian menjalin hubungan dengan Anna Schulthess namun hubungan mereka tidak direstui orang tua Anna karena Pestalozzi seorang pengangguran miskin. Pestalozzi kemudian belajar tentang pertanian dan bisa meyakinkan keluarga Anna sehingga mereka menikah pada tanggal 30 September 1769. Pestalozzi kemudian membuka lahan pertanian di Neuhof namun kembali usaha pertaniannya tidak berhasil karena terjadi perselisihan dengan tetangga mereka yang mayoritas peternak.

Melihat kemalangan anak-anak di sekitarnya dan melihat rumahnya yang setengah kosong, Pestalozzi kemudian mendirikan sekolah bagi anak-anak miskin dan mengajarkan tiga tujuan yaitu: memperbaiki akhlak para pelajar, mendidik untuk dapan membaca, menulis dan berhitung dan melatih anak-anak keterampilan yang bisa menolong mereka keluar dari kemelaratan. Hasil dari keterampilan mereka gunakan untuk membiayai sekolah namun karena tidak bisa mandiri, sekolah itupun ditutup.

Pestalozzi juga gagal mengurus rumah tangganya ketika dia menjadi pengangguran dan anaknya memiliki keterbelakangan mental sehingga orang-orang sempat menganggap bahwa Pestalozzi gila. Namun karena bantuan dan motifasi dari teman-temannya, dia bisa mendapat kesempatan menuangkan idenya dalam lomba menulis sehingga orang-orang mulai mengenal karyanya.

Sumber: <http://athenlengkong.blogspot.co.id/2011/03/johann-heinrich-pestalozzi-pendiri.html>